BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Jaringan Komunikasi Wacana dalam gerakan sosial #TolakTapera pada penelitian ini terbentuk secara desentralisasi, yaitu tidak dikendalikan oleh satu aktor tunggal saja. Wacana yang menyebar dikarenakan adanya partisipasi dan interaksi dengan pengguna yang berlatar belakang pekerja, komunitas digital dan sesama warga sipil. Gerakan alami ditandai dari adanya wacana yang muncul dan berkembang secara spontan dengan berbagai respons emosional terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil.

Hubungan antar pengguna dalam #TolakTapera terjalin atas emosi bersama, terutama rasa kecewa kepada pemerintah, marah dan frustrasi atas pengesahan kebijakan Tapera. Selain itu, terdapat kekecewaan dengan lelucon yang satir. Penggunaan *hashtag* menjadi simbol unik yang menyatukan penolakan bersama untuk memperlihatkan bahwa *platform X* dapat berfungsi sebagai wadah dan fasilitator dalam perlawanan. Melalui *platform X*, maka dapat mempercepat interaksi melalui *retweet*, *reply* dan *mention* untuk memperkuat hubungan antar aktor dan memperluas wacana yang berkembang.

Wacana #TolakTapera tidak bersifat tunggal, melainkan terdapat pertarungan wacana antara pro dan kontra. Aktor pro merupakan akun yang berasal dari pemerintah, penyelenggara, media yang mempromosikan dan akun yang terdeteksi sebagai pendukung pemerintah. Aktor pro dalam hal ini memiliki wacana bahwa Tapera bersifat membantu dan pro masyarakat. Hal tersebut dikarenakan adanya kata seperti “kemudahan”, “jaminan hari tua”, dan “iuran” yang merupakan kata-kata yang cenderung formal dan merangkul.

Sedangkan untuk aktor yang kontra berasal dari masyarakat dengan golongan masyarakat biasa, selebtwit, artis, akun Kpopers dan akun parodi yang menyampaikan penolakkannya terhadap kebijakan Tapera. Wacana yang digunakan

pada kubu kontra yaitu penggunaan kalimat dengan menceritakan pengalaman langsung, adanya keresahan ekonomi, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan bahkan terdapat *tweet* satir serta lelucon. Dapat disimpulkan bahwa teks yang disebarakan menandakan adanya makna dan persepsi

Peneliti mengidentifikasi kalimat pro dan kontra dalam wacana terkait Tapera di *platform X*, sebagai berikut:

Pro terhadap Kebijakan Tapera:

- 1) Narasi “Gotong Royong”: Tapera dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat untuk saling membantu dalam hal kepemilikan rumah.
- 2) Narasi “Kesejahteraan”: Tapera dianggap sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat demi membangun masa depan yang lebih baik.
- 3) Wacana kepatuhan negara dalam mekanisme hukum: Tapera dianggap kebijakan yang telah dibuat sejak lama, sehingga disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 memang sudah seharusnya berjalan semestinya dan dapat diterima oleh masyarakat.
- 4) Wacana jangka panjang dengan narasi “tabungan masa depan”: Tapera merupakan tabungan periodik yang dapat dinikmati saat hari tua, meskipun tidak digunakan dalam kepemilikan rumah.

Kontra terhadap Kebijakan Tapera:

- 1) Perampasan hak dalam segi finansial masyarakat: Tapera dianggap sebagai simbol kebijakan yang merampas hak masyarakat dalam memiliki pendapatan bulanan hasil dari kerja keras. Adanya skema iuran dengan memotong gaji karyawan, menambah beban perekonomian pekerja.
- 2) Wacana krisis kepercayaan terhadap negara: Muncul narasi kuat bahwa masyarakat mencurigai pemerintah atas pengelolaan dana publik. Hal tersebut dikarenakan banyaknya isu praktik korupsi yang dilakukan pada pengelolaan dana. Dengan adanya isu korupsi, maka membuat masyarakat trauma dan tidak percaya terhadap pemerintah apabila berkaitan dengan dana publik.

- 3) Tidak tepat sasaran: Pengguna *platform X* memiliki wacana bahwa Kebijakan Tapera tidak tepat sasaran. Pengenaan kepada pekerja dengan pendapatan minimal UMR dan ke hampir seluruh golongan pekerja, Kebijakan Tapera dirasa kurang tepat dalam membantu mengurangi *backlog* perumahan.
- 4) Pemaksaan ideologi tanpa partisipasi: Narasi halus seperti “gotong royong”, “kesejahteraan” dan “tabungan masa depan” dianggap sebagai alat wacana untuk meminta masyarakat menyetujui kebijakan. Masyarakat merasa bahwa melalui Kebijakan Tapera, pemerintah melimpahkan tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa hasil yang diperoleh memiliki keterbatasan pada hasil representasi masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan data yang dianalisis bersumber dari percakapan digital di *platform X*, sehingga temuan ini lebih merefleksikan dinamika wacana dalam menyuarakan opini secara daring. Kelompok masyarakat yang tidak aktif di media sosial tidak terjangkau dalam analisis ini. Temuan penelitian ini merupakan representasi dari masyarakat yang aktif di *platform X* sebagai ruang digital dalam berpartisipasi secara daring. Masyarakat digital tersebut bukan hanya konsumen dari suatu informasi, namun pula sebagai produsen wacana yang mampu membentuk opini, menentang narasi, dan bahkan memunculkan bentuk resistensi ideologi. Di tengah arus informasi yang sangat cepat, *platform X* memberikan ruang bagi demokratisasi ekspresi sekaligus memperlihatkan bagaimana kekuasaan dimediasi dan dipertanyakan.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai Jaringan Komunikasi Wacana dalam gerakan sosial #TolakTapera di *platform X*, penulis memiliki beberapa saran kepada berbagai pihak, yakni:

- 1) Bagi pengguna media sosial dan masyarakat sipil, perlunya literasi dan etika dalam berwacana dapat ditingkatkan dalam rangka meminimalisir disinformasi

atau ujaran kebencian. Seperti yang diketahui bahwa terdapat banyak kebijakan dari segala sisi yang mengatur terkait etika dalam penggunaan media sosial. Namun penulis tetap menyarankan agar terus menyuarakan pendapat pengguna media selaku masyarakat sipil dalam mempertahankan atau mengembalikan hak masing-masing sebagai warga negara Indonesia;

- 2) Bagi pemerintah, perlunya memberikan informasi secara lengkap dan transparan mengenai kebijakan. Kemudian perlunya dilakukan survei terlebih dahulu apakah program dari kebijakan Tapera benar-benar dibutuhkan atau justru membebankan. Sebaiknya pemerintah dapat membenahi aturan yang telah ada dan mengurangi isu serta polemik dengan caranya sendiri, bukan menambah histori kegagalan dalam memahami masyarakat.